MATRIK SANDINGAN PETA IRISAN KINERJA RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RPD) dan IRISAN KINERJA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2023 - 2026 PROVINSI BANTEN

PERANGKAT DAERAH : BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

URUSAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN: MASALAH POKOK	PERMASALAHAN: MASALAH	PERMASALAHAN: AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR (DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR	STRATEGI	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	SASARAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (Definisi Operasional)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF PER INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET 2022 TARGET	TARGET 2022 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2023 TARGET	TARGET 2023 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2024 TARGET	TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2025 TARGET	TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2026 TARGET	TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp.)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE 2021	TARGET 2022 TARGET	TARGET 2022 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2023 TARGET	TARGET 2023 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2024 TARGET	TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2025 TARGET	TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2026 TARGET	TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp.)	RENCANA LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Belum Optimal			Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang Optimal	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat			Σ Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang diimplementasikan x100 Σ Target Rumusan Kebijakan Pemerintahan Kesra yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat						100	100	43.934.541.931	100	65.565.000.000	100	65.565.000.000	100	65.565.000.000	100	65.565.000.000															
							1. Meningkatnya Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan	Capaian Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan	Σ Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan x100 Σ Target Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100					1. Meningkatnya Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan		Capaian Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan	Σ Realisasi Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan x100 Σ Target Rumusan Kebijakan Pemerintahan yang diimplementasikan		%	100	100	4.300.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000															
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan belum optimal	Pencapaian Parameter Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Belum Optimal				Persentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan	Capaian realisasi kebijakan administrasi kewilayahan terhadap target kebijakan administrasi kewilayah	Σ Realisasi Kebijakan administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan x100 Σ Target Kebijakan administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100						Persentase realisasi kebijakan administrasi Pemerintahan dan Administrasi kewilayahan	Capaian realisasi kebijakan administrasi kewilayahan terhadap target kebijakan administrasi kewilayah	Σ Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan x100 Σ Target Kebijakan Administrasi Kewilayahan		%	100	100	700.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000															
				Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Optimal				Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah	Capaian realisasi kebijakan Otonomi Daerah terhadap target kebijakan Otonomi Daerah	Σ Realisasi Kebijakan Otonomi daerah x100 Σ Target Kebijakan Otonomi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100						Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah	Capaian realisasi kebijakan Otonomi Daerah terhadap target kebijakan Otonomi Daerah	Σ Realisasi Kebijakan Otonomi daerah x100 Σ Target Kebijakan Otonomi Daerah		%	100	100	900.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000															
			Pelaksanaan Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Belum Optimal	Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan Belum Optimal				Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	Capaian realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan terhadap kebijakan kerjasama pemerintahan	Σ Realisasi Kebijakan KerjasamaPemerintahan x100 Σ Target Kebijakan Kerjasama Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100						Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	Capaian realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan terhadap kebijakan kerjasama pemerintahan	Σ Realisasi Kebijakan KerjasamaPemerintahan x100 Σ Target Kebijakan Kerjasama Pemerintahan		%	100	100	1.700.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000															
				Persentase Realisasi Kebijakan Otonomi Daerah Belum Optimal																								%	100	100	1.700.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000															
				Persentase Realisasi Kebijakan Kerjasama Pemerintahan Belum Optimal																																																		
			Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Belum Optimal				2. Cakupan realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi Cakupan Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Realisasi Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Σ Realisasi Cakupan Kebijkan Kesejahteraan Rakyat x100 Σ Target Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi Cakupan Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Realisasi Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Σ Realisasi Cakupan Kebijkan Kesejahteraan Rakyat x100 Σ Target Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		%	100	100	35.782.601.931	100	58.300.000.000	100	58.300.000.000	100	58.300.000.000	100	58.300.000.000															
				Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Belum Optimal				Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Capaian cakupan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terhadap target fasilitasi pembinaan mental spiritual	Σ Cakupan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual x100 Σ Target Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	%	100	100	100	100	100	100	100						Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Capaian cakupan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terhadap target fasilitasi pembinaan mental spiritual	Σ Cakupan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual x100 Σ Target Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		%	100	100	34.632.601.931	100	56.500.000.000	100	56.500.000.000	100	56.500.000.000	100	56.500.000.000															
				Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar Belum Optimal				Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Capaian Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar terhadap target Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Σ Realisasi Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar x100 Σ Target Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100						Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Capaian Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar terhadap target Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Σ Realisasi Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar x100 Σ Target Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar		%	100	100	650.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000															
				Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar Belum Optimal				Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan	Capaian Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar terhadap target Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	Σ Realisasi Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar x100 Σ Target Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100						Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan	Capaian Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar terhadap target Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	Σ Realisasi Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar x100 Σ Target Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar		%	100	100	500.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000															
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH																																																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN																											Nilai	85	85	3.851.940.000	85	4.215.000.000	85	4.215.000.000	85	4.215.000.000	85	4.215.000.000															
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;																											%	100	100	171.940.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000															
	Persentase terwujudnya penata usaha																											%	100	100	45.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000															
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;																											%	100	100	555.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000															
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.																											%	100	100	3.080.000.000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000															
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi																																									7	8	171.940.000	8	215.000.000	8	215.000.000	8	215.000.000	8	215.000.000		
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																																									1	1	90.740.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																																									1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
	1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																																									1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
	1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																																									1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
	1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																																									1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
	1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																									1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
	1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																									1	2	18.200.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																									1	3	45.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
	2.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																																									1	1	20.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		
	2.2 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																																									0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
	2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																																									0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat																																									3	3	555.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000		
	3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																																									1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
	3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																																									1	1	325.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
	3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																																									1	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah																																									4	4	1.520.000.000	4	1.550.000.000	4	1.550.000.000	4	1.550.000.000	4	1.550.000.000		
	4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																									1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
	4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																									1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
	4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																									1	1	220.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
	4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																									1	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000		
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan																																									1	1	1.560.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000		
	5.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																									1	1	1.560.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI																																									100	100	3.300.000.000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000		
	Persentase realisasi kebijakan Administrasi kewilayahan																																									100	100	700.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000		
	Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah																																									100	100	900.000.000	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000		
	Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan																																									100	100	1.700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
	1 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan									Σ Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan																														Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	3 Sub Kegiatan	Dokumen	6	700.000.000	6	1.100.000.000	6	1.100.000.000	6	1.100.000.000	6	1.100.000.000		
	1.1 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																																							Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan pemerintahan	Dokumen bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan,pembentukan, pemecahan, pengabunggan dan penghapusan serta pemekaran wilayah	3	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
	1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																																							Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	- Dokumen pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; - Dokumen fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban serta penetapan lokasi	3	2	100.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
	1.3 Fasilitasi Penataan Wilayah																																							Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	- Dokumen bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi - Dokumen penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah serta tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang ilaksanakan kabupaten/kota - Dokumen fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota	3	3	450.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000		

URUSAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN MASALAH POKOK	PERMASALAHAN MASALAH	PERMASALAHAN AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR (DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI AKHIR	STRATEGI	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	SASARAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (Definisi Operasional)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF PER INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2021	TARGET 2022 TARGET	TARGET 2022 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2023 TARGET	TARGET 2023 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2024 TARGET	TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2025 TARGET	TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET 2026 TARGET	TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2 Pelaksanaan Otonomi Daerah									***Σ Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah***																													
	2.1 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																																						
	2.2 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																																						
	2.3 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																																						
	3 Fasilitasi Kerjasama Daerah									***Σ Dokumen Kerjasama***																													
	3.1 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah																																						
	3.2 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta																																						
	3.3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																																						
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT																																						
	Realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual																																						
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar																																						
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar																																						
	1 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual									***Σ Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual***																													
	1.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																																						
	1.2 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																																						
	2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									***Σ Dokumen Fasilitasi Pengembangan Kesejaheraan Rakyat Pelayanan Dasar***																													
	2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																																						
	2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																																						
	2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																																						
	3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar									***Σ Dokumen Fasilitasi Pengembangan Kesejaheraan Rakyat Non Pelayanan Dasar***																													
	3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																																						
	3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																																						
	3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																																						

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	BASELINE 2021	2022 TARGET	2022 PAGU INDIKATIF (Rp.)	2023 TARGET	2023 PAGU INDIKATIF (Rp.)	2024 TARGET	2024 PAGU INDIKATIF (Rp.)	2025 TARGET	2025 PAGU INDIKATIF (Rp.)	2026 TARGET	2026 PAGU INDIKATIF (Rp.)	RENCANA LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
2	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
2 Pelaksanaan Otonomi Daerah	**Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**3 Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**9**	**900.000.000**	**9**	**1.250.000.000**	**9**	**1.250.000.000**	**9**	**1.250.000.000**	**9**	**1.250.000.000**		
2.1 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kep[ala Daerah dan DPRD	- Dokumen bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah - Dokumen Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
2.2 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	- Dokumen bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah - Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dokumensosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	250.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000		
2.3 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Dokumen LPPD - Dokumen SPM	Dokumen	4	400.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000		
3 Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**3 Sub Kegiatan**	**Dokumen**	**10**	**1.700.000.000**	**10**	**1.000.000.000**	**10**	**1.000.000.000**	**10**	**1.000.000.000**	**10**	**1.000.000.000**		
3.1 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	- Dokumen Kerjasama antar Daerah - Dokumen kerjasama luar negeri - Dokmen bahan perumusan kebijakan untuk forum- forum kerjasama daerah Dokumen administrasi ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri	7	10	1.500.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000		
3.2 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	- Dokumen bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga	3	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar daerah dan Luar Negeri - Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta/Pihak Ketiga	2	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			**%**	**100**	**35.782.601.931**	**100**	**58.300.000.000**	**100**	**58.300.000.000**	**100**	**58.300.000.000**	**100**	**58.300.000.000**		
Realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			%	100	34.632.601.931	100	56.500.000.000	100	56.500.000.000	100	56.500.000.000	100	56.500.000.000		
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar			%	100	650.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000		
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar			%	100	500.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000		
1 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	**Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**2 Sub Kegiatan**	**4**	**100**	**34.632.601.931**	**100**	**56.500.000.000**	**100**	**56.500.000.000**	**100**	**56.500.000.000**	**100**	**56.500.000.000**		
1.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	- Dokumen Pengwlolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000	1	6.500.000.000		
1.2 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	- Dokumen Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2	2	28.132.601.931	2	50.000.000.000	2	50.000.000.000	2	50.000.000.000	2	50.000.000.000		
2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	**Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**3 Sub Kegiatan**	**3**	**6**	**650.000.000**	**6**	**900.000.000**	**6**	**900.000.000**	**6**	**900.000.000**	**6**	**900.000.000**		
2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	- Dokumen Kebijakan Kesra Bidang Pendidikan	1	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	- Dokumen Kebijakan Kesra Bidang Kesehatan	1	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	- Dokumen Kebijakan Kesra Bidang Sosial	1	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**3 Sub Kegiatan**	**3**	**7**	**500.000.000**	**7**	**900.000.000**	**7**	**900.000.000**	**7**	**900.000.000**	**7**	**900.000.000**		
3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	- Dokumen Kebijakan Kesra Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	3	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- Dokumen Kebijakan Kesra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	3	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	- Dokumen Kebijakan Kesra Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

Kolom (1), (2), (22), (39), (23), (41) — diisi dengan uraian urusan, bidang urusan, program dan kegiatan (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Kolom (3), s.d (5) — diisi dengan identifikasi permasalahan yang ada pada urusan masing-masing Perangkat Daerah
Kolom (6) — diisi isu strategis pada masing-masing tingkatan yang berhubungan dengan daerah
Kolom (7), (8) — diisi dengan tujuan dan sasaran (sesuai dengan Dokumen RPD)
Kolom (9) — diisi dengan indikator tujuan dan sasaran (sesuai dengan Dokumen RPD)
Kolom (10) dan (26) — diisi dengan penjelasan metadata definisi operasional indikator
Kolom (11) dan (27) — diisi dengan rumus perhitungan capaian indikator
Kolom (12) — diisi dengan satuan
Kolom (13) s.d (19) — diisi dengan target capaian Indikator kinerja tujuan/sasaran
Kolom (20) s.d (22) — diisi dengan strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah (sesuai dengan Dokumen RPD)
Kolom (24) dan (25) — diisi dengan sasaran program/outcome, indikator kinerja program
Kolom (28) — diisi dengan kerangka pendanaan indikatif per indikator kinerja program
Kolom (30) s.d (40) — diisi dengan target capaian indikator kinerja program dan pendanaan
Kolom (42) — diisi dengan indikator kinerja kegiatan/indikator kinerja sub kegiatan
Kolom (43) s.d (53) — diisi dengan target capaian indikator kinerja kegiatan dan pendanaan
Kolom (54) — diisi dengan lokasi pelaksanaan kegiatan
Kolom (55) — diisi dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab
(**) contoh data

Serang, 27 Januari 2022
epala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya
Sekretariat Daerah Provinsi Banten

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002